

**ANALISIS DETERMINAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT
DALAM ERA OTONOMI DAN DESENTRALISASI FISKAL**

*Analysis Determinants in Regional Shopping District / City West Java Province
In Era Autonomy and Fiscal Decentralization*

Hadi Sasana

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241
(hadisasanasmg@yahoo.com)

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, sesuai dengan motivasi daerah untuk mengembangkan wilayahnya berdasarkan potensi unggulan daerah. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi telah diterapkan di Indonesia selama hampir satu dekade, daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Penelitian ini mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dana perimbangan, dan jumlah penduduk, terhadap belanja pemerintah daerah di kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat. Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto, transfer dana, dan pengaruh populasi berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah di kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dana perimbangan, penduduk, dan belanja pemerintah daerah

ABSTRACT

Local autonomy and implementation of fiscal decentralization are expected to improve equality of local developments, in accordance with the motivation of local governments to develop their region based on their specific potentiality. However, some researches indicate that although decentralization has been implemented in Indonesia for almost a decade, the regions still strongly depend on the central government financially. This research examine regionally original income, gross regional domestic product, transfer fund, and population, to local government spending in regencies/municipalities in West Java Province. The important findings of this research indicate that gross regional domestic product, transfer fund, and population positive influence to local government spending in regencies/municipalities in West Java Province.

Key Words: *regionally original income, gross regional domestic product, transfer fund, population, and local government spending*

PENDAHULUAN

Tingkat kemandirian daerah di bidang keuangan belum memperlihatkan kemajuan yang berarti bahkan cenderung menurun selama satu dasawarsa terakhir. Pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pusat dan belum memiliki sumber pendapatan asli daerah yang kuat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Adi (2007), serta Setiaji dan Adi (2007), menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada Dana Alokasi Umum (DAU) daripada mengupayakan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Adi (2007), memperlihatkan indikasi kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah.

Otonomi daerah dan desentralisasi yang efektif berlaku sejak tahun 2001 merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Konsekuensinya adalah pelimpahan wewenang yang diikuti alokasi anggaran dan penyediaan barang publik pada pemerintah daerah. Halim (2001), menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.

Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan fungsinya, PAD seharusnya merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi. Kenyataan yang terjadi adalah dana transfer justru dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan nilai pendapatan asli daerah (PAD) yang mampu dikumpulkan oleh daerah.

Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama melaksanakan otonomi dan desentralisasi juga mengalami hal yang sama, yaitu relatif rendahnya kemandirian di bidang pembiayaan yang bersumber dari PAD. Kinerja atau kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah selama tahun 2004 sampai dengan 2008 di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat terlihat dalam Tabel 1 (dalam Lampiran):

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama periode 2004 hingga 2008 terjadi peningkatan dana perimbangan ke daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang cukup besar. Pada tahun 2004, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebesar Rp 11.048.226 juta. Nilai dana perimbangan tertinggi pada tahun 2007 mencapai Rp 26.617.665 juta. Bila dibandingkan dengan PAD, walaupun mengalami peningkatan, sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan pada dana perimbangan, hal ini mencerminkan adanya ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat.

Dari aspek makro ekonomi, berdasarkan nilai PDRB riil menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi juga diikuti oleh bertambahnya penduduk tiap tahunnya. Kondisi ini akan menuntut penyediaan anggaran belanja daerah yang semakin besar. Nilai PDRB riil dan jumlah penduduk kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dari tahun 2004 sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut:

Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan yang bersumber dana perimbangan, menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Dari sisi pengeluaran dalam struktur keuangan daerah, perkembangan belanja daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2008 terlihat dalam Tabel2 (dalam lampiran).

Berdasarkan data Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai total belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah kabupaten/kota mengalami kecenderungan yang meningkat. Sebaliknya rasio PAD terhadap total belanja cenderung menurun. Tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat, sekaligus menjadi tekanan dalam pengumpulan PAD di daerah.

Meningkatnya transfer pemerintah (dalam bentuk dana perimbangan) kepada daerah untuk meningkatkan belanja daerah, menimbulkan spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah dengan studi kasus di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
4. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk lebih menyikapi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah

terutama dari aspek pemberian dana transfer dan kemandirian daerah.

2. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perilaku pemerintah daerah terhadap kebijakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga dapat dijadikan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*), dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu daesentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah (Handayani 2009).

Menurut Khusaini (2006), desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personil, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah. Desentralisasi dapat pula diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan adanya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Handayani 2009). Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi wewenang (otonomi) untuk menentukan alokasi atas

pengeluarannya sendiri. Faktor lain juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi (Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto, 1993).

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam prosentase terhadap PDB semakin besar dan prosentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Belanja Daerah

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja aparatur daerah
2. Belanja pelayanan publik
3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
4. Belanja tidak tersangka.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja Langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2. Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Fenomena yang muncul dalam era otonomi, bahwa transfer pemerintah khususnya DAU begitu dominan dalam membiayai belanja daerah, dan kurang berdampak pada PAD daerah diindikasikan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*).

Menurut Priyo (2009), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal.

Hubungan PDRB, Dana Perimbangan, PAD, dan Jumlah Penduduk dengan Belanja Daerah

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Sukirno, 2009). Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Selanjutnya dengan peningkatan penerimaan daerah, akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Jadi PDRB dan belanja daerah memiliki hubungan yang positif. Bila PDRB mengalami peningkatan maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan.

Dana perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Penduduk dewasa ini merupakan subyek pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan beberapa penelitian sebelumnya dapat di ambil hipotesis sebagai berikut:

1. Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
2. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
3. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
4. Jumlah penduduk pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah semua daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 26 daerah, terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota. Periode waktu penelitian tahun 2004-2008. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia di www.djpk.depkeu.go.id.

Variabel penelitian meliputi, variabel independen terdiri dari : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Jumlah Penduduk. Variabel dependen adalah Belanja Daerah (BD). Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan model ekonometrika berdasarkan pada pengembangan teori sebagai berikut:

$$\text{LogBD} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPDRB} + \beta_2 \text{LogPAD} + \beta_3 \text{LogDP} + \beta_4 \text{LogJP} + \mu \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana:	BD	=	Belanja Daerah
	PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
	PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
	DP	=	Dana Perimbangan
	JP	=	Jumlah Penduduk
	μ	=	<i>Disturbance Error</i>

PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Barat, secara geografis, terletak pada posisi 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur. Luas wilayah meliputi wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 17 daerah kabupaten dan 9 kota. Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2009 adalah 42,61 juta jiwa, dengan angka ketergantungan 52,55.

Perkembangan Belanja Daerah

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran langkah konkret Pemda dalam memberikan pelayanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat bersangkutan. Gambar 1 (dalam lampiran), menunjukkan perkembangan total belanja daerah kabupaten/kota Se-Jawa Barat periode 2004-2008

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa belanja daerah kab/kota se-Jawa Barat dalam periode waktu 2004 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2006 dimana belanja daerah meningkat 35,25% dari tahun 2005. Besarnya peningkatan belanja ini menunjukkan bahwa tingginya agresivitas pemerintah daerah setempat dalam membelanjakan pendapatan daerah untuk pembangunan.

Perkembangan PDRB

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. Melalui data PDRB dapat diketahui kondisi perekonomian regional suatu daerah. Berikut ini akan disajikan data mengenai total PDRB riil kab/kota Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2008, terlihat dalam gambar 2 (dalam lampiran).

Pertumbuhan PDRB dalam periode 2004-2008 relatif berfluktuasi, nilai absolut cenderung meningkat dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu tumbuh sebesar 5,9%.

Deskripsi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri (Yunarko, 2007). Berikut disajikan data pendapatan asli daerah (PAD) kab/kota di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2004-2008. terlihat dalam gambar 3 (dalam lampiran).

Gambar 3 menunjukkan nilai nominal PAD dalam 5 tahun periode pengamatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat dari pertumbuhannya cenderung berfluktuasi, pertumbuhan PAD tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 42,10% dibanding tahun sebelumnya.

Dana Perimbangan

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten yang cukup banyak di Indonesia dan jumlah penduduk yang besar, sehingga berpengaruh pada penerimaan dana perimbangan. Hal ini disebabkan karena besarnya kebutuhan fiskal daerah yang disertai dengan alokasi yang juga tinggi. Berikut ini disajikan data mengenai jumlah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota Se-Jawa Barat pada tahun 2004-2008 terlihat dalam gambar 4 (dalam lampiran).

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa dari tahun ke tahun, dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota di Jawa Barat meningkat, walaupun dengan pola yang fluktuatif. Pertumbuhan yang paling besar terdapat pada tahun 2007 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 51,54 persen. Dana perimbangan sampai saat ini masih merupakan sumber penerimaan daerah paling besar dalam rangka membiayai belanja daerah.

Perkembangan Jumlah Penduduk

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Berikut ini akan disajikan mengenai perkembangan jumlah penduduk di kab/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2008 terlihat dalam gambar 5 (dalam lampiran)..

Gambar 5 menunjukkan jumlah penduduk di Jawa Barat cenderung meningkat setiap tahunnya, tahun 2004 jumlah penduduk dari 26 kab/kota di Jawa Barat adalah 38.942.229 orang. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2005 menjadi 39.960.869 orang, kemudian menjadi 42.194.869 pada tahun 2008. Pertumbuhan penduduk paling tinggi dalam periode pengamatan adalah tahun 2005 yaitu sebesar 2,6%.

Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan regresi linear berganda metode OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai alat analisis. Karena sifat penaksir OLS yang BLUE (*best linear unbiased estimator*), dimana kelas penaksir tidak bias mempunyai varians yang minimum (Gujarati, 2005).

Hasil estimasi data berdasarkan model yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3 (dalam lampiran).

Uji Asumsi Klasik

Mempertimbangkan bahwa dalam model regresi yang ingin dicapai adalah *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) maka harus memenuhi kaidah asumsi klasik berupa uji multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Berdasarkan uji asumsi klasik hasil estimasi telah memenuhi semua kriteria asumsi klasik.

Hasil uji normalitas dengan melihat nilai Jargue-Bera dibandingkan dengan nilai χ^2 tabel, diperoleh hasil bahwa J-B hitung nilai χ^2 tabel. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa residual μ terdistribusi normal. Uji multikolinieritas menggunakan auxiliary regressions, hasil menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Park, disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedas-

tisitas dalam model. Autokorelasi diuji dengan *Durbin Watson test*, diketahui bahwa persamaan tersebut bebas dari autokorelasi.

Selanjutnya dilakukan pula uji komprehensif (uji F) maupun uji parsial (uji t). Berdasarkan uji statistik F dapat diketahui bahwa semua variabel independen secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4 (dalam lampiran).

Berdasarkan pada uji t yang terlihat pada Tabel 4, pada taraf keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$) adalah semua variabel independen yaitu PDRB, DAU, PAD dan jumlah penduduk signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (belanja daerah).

Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,943153. Hal ini berarti bahwa variasi pada variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 94,32 persen, sedangkan 5,68 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Interpretasi Hasil dan Analisis.

Hasil estimasi pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa PDRB, dana perimbangan, dan jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan belanja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. PDRB berhubungan positif dengan belanja daerah, dan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah dengan koefisien 1,723229. Nilai ini berarti bahwa dengan menganggap variabel lain konstan, apabila PDRB meningkat sebesar 1 persen akan meningkatkan belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 1,72 persen.

Dana perimbangan mempunyai hubungan positif dengan belanja daerah, dan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah dengan koefisien 0,233771. Hasil estimasi ini berarti bahwa dengan menganggap variabel lain konstan, apabila dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 1 persen akan meningkatkan belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 0,23 persen.

Jumlah penduduk mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan belanja daerah, dan mempengaruhi belanja daerah dengan koefisien 3,590285. Hasil estimasi ini berarti bahwa dengan menganggap variabel lain konstan, peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen akan meningkatkan belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 3,59 persen.

Pendapatan Asli Daerah daerah berhubungan positif dengan belanja daerah, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dengan belanja daerah. Hal ini mengingat relatif kecilnya sumbangan PAD terhadap total belanja di masing-masing daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil dan analisis data penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk Domestik regional bruto riil berhubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah
2. Dana perimbangan berhubungan positif dengan belanja daerah, dan mempengaruhi belanja daerah
3. Jumlah penduduk berhubungan positif dengan belanja daerah, dan mempengaruhi belanja daerah
4. Pendapatan Asli Daerah berhubungan positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Saran

1. Sampai saat ini daerah otonom masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Tingginya ketergantungan daerah dapat disiasati melalui optimalisasi PAD yang diperoleh pemerintah daerah. Salah satu caranya adalah dengan mencari objek pajak baru yang potensial dan mengurangi kebocoran pajak dengan *law enforcement*.
2. Alokasi belanja daerah ke sektor riil (pembangunan sarana dan prasarana publik) perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi.

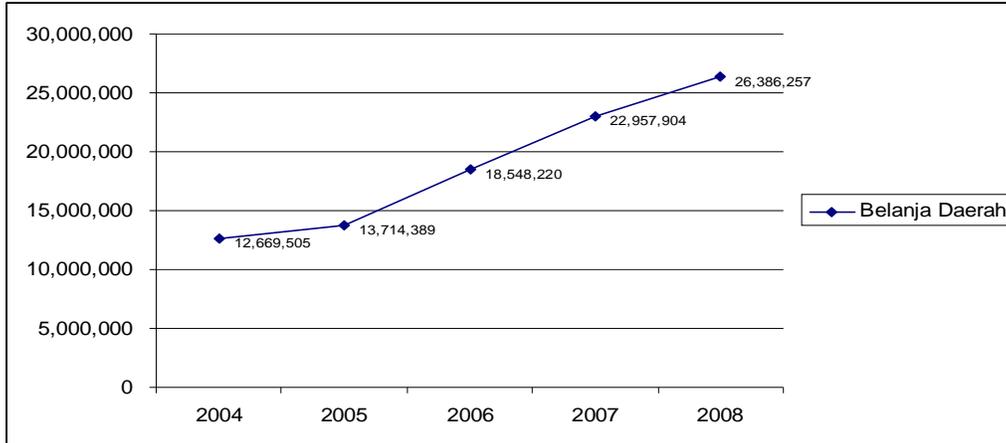
DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. (2006). "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- _____ (2007). "Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi." *The 1st National Accounting Conference*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- _____ (2009). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No.1.
- Bawono, Bernando Gatot Tri. (2008). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar N., (2005). *Basic Econometrics*, New York: McGraw-Hill.
- Halim, Abdul, (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- _____ (2001). Anggaran daerah dan "fiscal stress" (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah orovinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 16 (4): 346-357.
- _____ (2002). Analisis varian pendapatan all daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah *Disertasi* diterbitkan.
- Handayani, Atiah. (2009). "Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Ilmu Ekonomi dan Studi

- Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Holtz, Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. (1994). Intertemporal Analysis of state and local government spending: Theory and test. *Journal Of Urban Economics* 35: 159-174.
- Khusaini, Muhamad, (2006), *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang : BPFE Unbraw.
- Maimunah, Mutiara. (2006). "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Manan, Bagir. (1994). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. (2008). "Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat." *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Oates, Wallace E. (1999) "An Essay on Fiscal Federalism", *Journal of Economic Literature*, XXXVII, Sept, hal. 1120-1149
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/>
- Undang-Undang No. 32 Tahun (2004) *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun (2004) *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*

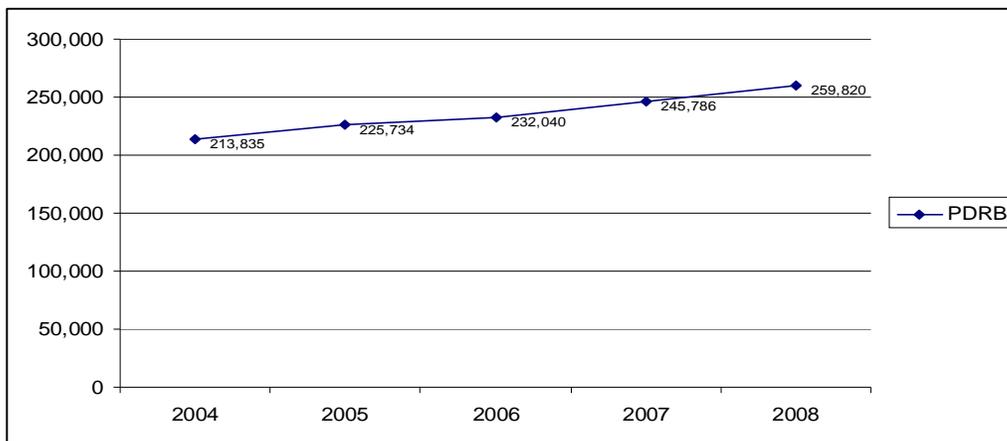
LAMPIRAN

Gambar 1. Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2004-2008 (dalam Juta Rupiah)

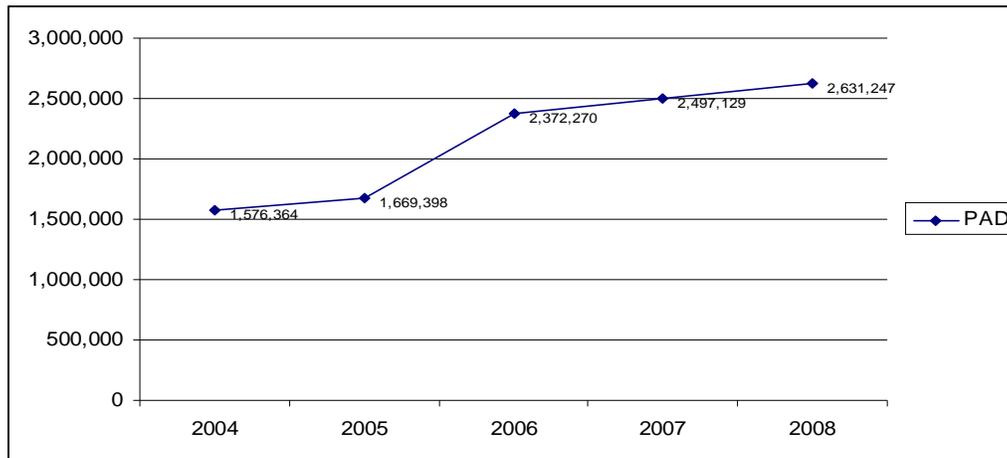


Sumber: BPS, diolah, 2010

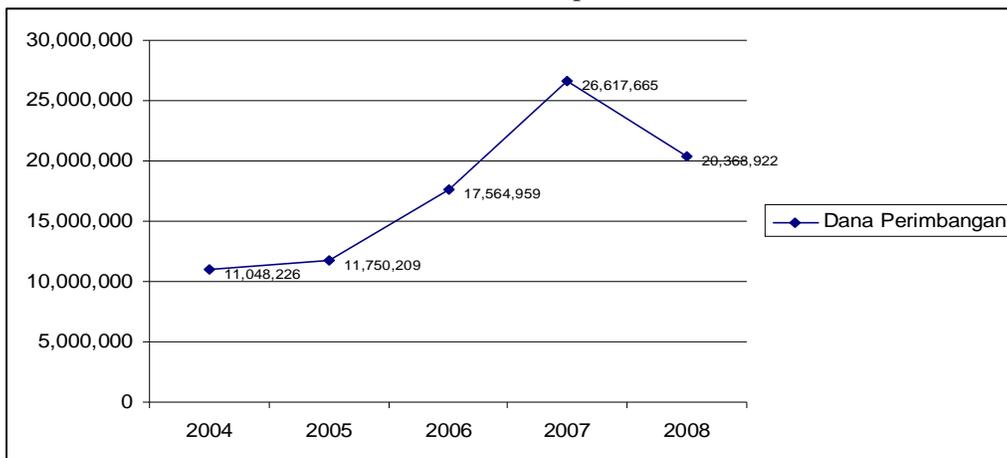
Gambar 2. Total PDRB Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008



Sumber: BPS, diolah, 2010

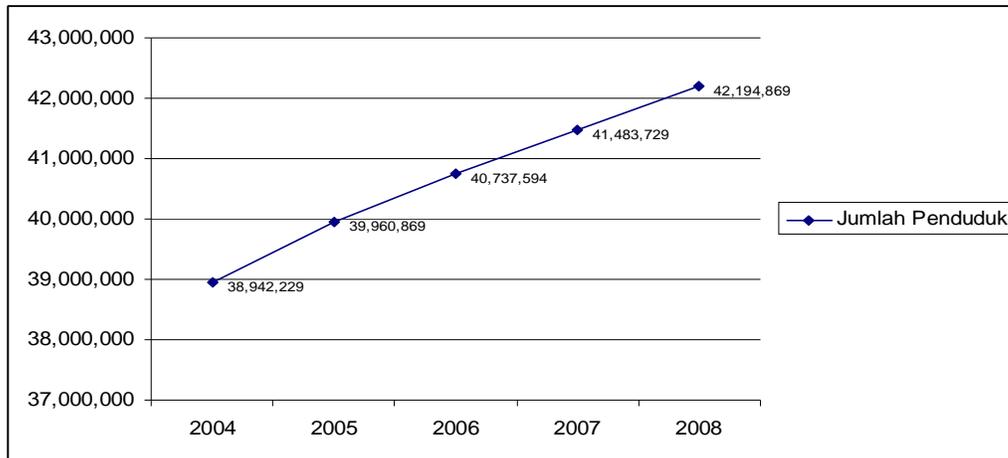
Gambar 3. Total PAD Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008

Sumber: BPS, diolah, 2010

Gambar 4. Total Dana Perimbangan Kab/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2004-2008 (dalam Juta Rupiah)

Sumber: BPS, diolah, 2010

Gambar 5
Jumlah Penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008
(dalam Orang)



Sumber: BPS, diolah, 2010

Tabel 1. Dana Perimbangan, PAD, PDRB, dan Penduduk
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008

TAHUN	PAD (Juta Rp)	Dana Perimbangan (Juta Rp)	PDRB (Milyar Rp)	Penduduk (Jiwa)
2004	1.576.364	11.048.226	320.707	38.942.229
2005	1.669.398	11.750.209	366.800	39.960.869
2006	2.372.270	17.564.959	435.362	40.737.594
2007	2.497.129	26.617.665	493.370	41.483.729
2008	2.631.247	20.368.922	568.784	42.194.869

Sumber: BPS Jabar, 2010, diolah

Tabel 2. Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun 2004-2008 (dalam Juta Rupiah)

TAHUN	Belanja Daerah
2004	12.669.505
2005	13.714.389
2006	18.548.220
2007	22.957.904
2008	26.386.257

Sumber: BPS Jabar, 2010, diolah

Tabel 3. Hasil Estimasi Belanja Daerah

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	1.723229	0.294631	5.848780	0.0000
LOG(PAD)	0.023035	0.065239	0.353089	0.7248
LOG(DP)	0.233771	0.053794	4.345637	0.0000
LOG(JP)	3.590285	0.848742	4.230126	0.0001
C	-55.51734	10.31049	-5.384548	0.0000
R-squared	0.943153	Mean dependent var	13.38894	
Adjusted R-squared	0.926573	S.D. dependent var	0.569847	
S.E. of regression	0.154413	Akaike info criterion	-0.698332	
Sum squared resid	2.288977	Schwarz criterion	-0.042163	
Log likelihood	72.64574	Hannan-Quinn criter.	-0.431765	
F-statistic	56.88423	Durbin-Watson stat	1.703153	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 4. Uji Statistik F

F-statistik	56.88423
Prob (F-statistik)	0.000000

Tabel 5. Hasil Uji t (Variabel Dependen = BD)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	1.723229	0.294631	5.848780	0.0000
LOG(PAD)	0.023035	0.065239	0.353089	0.7248
LOG(DP)	0.233771	0.053794	4.345637	0.0000
LOG(JP)	3.590285	0.848742	4.230126	0.0001
C	-55.51734	10.31049	-5.384548	0.0000

Signifikansi pada $\alpha = 5\%$